

Opportunities and Challenges in Implementing Independent Learning on Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) in Dentistry Study Program

Dendy Murdiyanto¹ , Nilasary Rochmanita Suparno², Nendika Dyah Ayu Murika Sari³, Ikmal Hafizi⁴, Juwita Raditya Ningsih⁵, Aprilia Yuanita Anwaristi⁶

¹ Department of Dental Biomaterial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Department of Radiologi Dental, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

³ Department of Pediatric Dentist, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

⁴ Department of Orthodontist, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

⁵ Department of Endodontist, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

⁶ Department of Periodontist, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 dm124@ums.ac.id

Abstract

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) is a policy made by Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia to face the 4.0 revolution. Students can take semester credit outside their university. Dentistry undergraduate programmes need knowledge that requires a good and rigid body of knowledge. The purpose of this study was to determine the opportunities and challenges of implementing MBKM in Dentistry UMS. The method used in this research was a descriptive survey. The number of respondents was 17 lecturers of FKG Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) and 346 undergraduate students of Dentistry in UMS. The result of the research is that students had a lack of knowledge about MBKM policy and the number of credits that can be converted is less than 10 credits. Students are also not ready enough to be part of MBKM activities. The conclusion is that if MBKM is implemented in FKG UMS, it requires policy adjustments so that it does not reduce learning time and affect student learning outcomes.

Keywords: *Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Dentistry; UMS.*

Peluang dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Prodi Kedokteran Gigi

Abstrak

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menghadapi revolusi 4.0. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi. Prodi Kedokteran Gigi memiliki ilmu yang membutuhkan *body of knowledge* yang baik dan *rigid*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan implementasi MBKM di Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Metode yang digunakan adalah survei deskriptif. Jumlah responden adalah 17 dosen tetap FKG UMS dan 346 mahasiswa S1 FKG UMS.

Hasil penelitian adalah pengetahuan dosen tentang kebijakan MBKM masih kurang dan jumlah SKS yang dapat dikonversikan adalah kurang dari 10 SKS. Mahasiswa juga belum menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM. Kesimpulannya adalah MBKM jika diterapkan di FKG UMS memerlukan penyesuaian kebijakan sehingga tidak mengurangi waktu pembelajaran dan mempengaruhi capaian pembelajaran lulusan mahasiswa.

Kata kunci: Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Pendahuluan

Revolusi industri muncul sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dunia saat ini telah memasuki revolusi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan pengembangan sistem digital [1]. Setiap revolusi memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda-beda serta akan memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap sektor termasuk sektor pendidikan. Setiap negara mulai menyusun kebijakan dalam program pendidikan yang merupakan strategi untuk menghadapi dunia kerja pada revolusi 4.0 [2].

Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pendidikan terutama untuk perguruan tinggi adalah program kampus merdeka atau yang biasa dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM memiliki empat program yang salah satu programnya adalah pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar atau mengambil SKS di luar perguruan tinggi, seperti magang, pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah, penelitian, kegiatan wirausaha dan proyek independen yang dibimbing oleh dosen pembimbing dan dapat dilaksanakan selama tiga semester [3].

Prodi kesehatan terutama profesi seperti kedokteran dan kedokteran gigi memiliki disiplin ilmu yang membutuhkan *body of knowledge* yang baik dan rigid. Pelaksana Tugas Dirjen Perguruan Tinggi, Nizam mengatakan, "Sangat susah kemerdekaan bagi mahasiswa kedokteran untuk, katakanlah, bikin *start up* dulu baru kemudian meneruskan kuliah kedokteran. Untuk bidang-bidang kesehatan itu tidak bisa". Menurut beliau prodi kedokteran memiliki bidang keilmuan yang baku sehingga kebijakan MBKM ini sulit untuk diterapkan di prodi kesehatan [4]. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan implikasi MBKM pada prodi kedokteran gigi.

2. Literatur Review

Keberadaan perguruan tinggi sebagai lembaga formal dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang signifikan apabila dilakukan dengan berlandaskan pada amanah institusi, dilaksanakan secara kontinu dan disertai komitmen tinggi dalam mengejawantahkan cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gagasan reformasi pendidikan tinggi lahir dari kebutuhan untuk merespons adanya kebutuhan industri, pada spektrum yang lebih luas yaitu pasar untuk melakukan konvergensi dengan pengetahuan [5,6].

Globalisasi bidang pendidikan pada negara berkembang dilakukan bukan oleh menteri atau para pengambil keputusan di bidang pendidikan, tetapi menteri dan petinggi di bidang ekonomi dan perdagangan [7]. Perguruan tinggi tidak lagi memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Perubahan terjadi secara terus-menerus dalam skala dan intensitas yang semakin meningkat. Khususnya dalam dua dekade terakhir ini, perubahan tersebut telah terjadi dalam skala dan intensitas yang sangat tinggi. Pendorong utama dari perubahan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [8].

Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia. Mendikbud menyatakan esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para

guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan [5].

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh direktorat pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Program MBKM memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Program MBKM sesuai Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan magang di industri, mahasiswa membangun desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian di lembaga riset, pengembangan kewirausahaan, proyek mandiri, dan proyek kemanusiaan [9].

Peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan menjadi fokus perguruan tinggi [10]. Perguruan tinggi pada era revolusi industri 4.0 ini harus mampu mendisrupsi diri dan menyiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS; b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Program Studi memiliki tugas untuk 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi MBKM; 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi; 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya; 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi; 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Selain itu, ada empat kebijakan penting dalam Kampus Merdeka yaitu 1) Pembukaan Program Studi Baru, 2) Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, 3) Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan 4) Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang setiap kebijakannya memiliki payung hukum masing-masing [9].

Pendidikan dokter gigi dikembangkan dari wawasan ilmu kedokteran yang mencakup ilmu pengetahuan yang mempelajari proses tumbuh kembang manusia mulai dari saat pembuahan sampai akhir hayat, berbagai konsep yang melandasi hidup dan kehidupan manusia mulai tingkat molekul sampai dengan tingkat individu utuh [11]. Ruang lingkup ilmu Kedokteran Gigi mencakup perubahan, penyimpangan atau keadaan tidak optimalnya fungsi sistem stomatognatik secara terpadu pada tingkat individu utuh sampai dengan molekuler, sebagai akibat interaksi dengan lingkungan, dan adanya pengaruh faktor genetik. Fungsi sistem stomatognatik tersebut meliputi fungsi pengunyahan, fungsi bicara, fungsi estetika, dan fungsi persyarafan [12]. Penyusunan kompetensi profesi dokter gigi haruslah berlandaskan akademik-profesional, selain memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), juga memperhatikan perubahan paradigma pelayanan kesehatan dan perubahan pola hubungan dokter-pasien yang demokratis. Hal

ini dikarenakan tuntutan profesi dokter gigi untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, benar secara ilmiah dan baik dari aspek etik. Setiap dokter gigi wajib menunjukkan kinerja yang prima (*best practices*) pada waktu melakukan pelayanan. Kemauan dan kemampuan belajar aktif dan mandiri yang berdasar pada *student-centered learning* harus dibina sejak awal program pendidikan dan sepanjang proses pendidikan sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina sikap dan kemampuan belajar secara berlanjut sesuai asas belajar sepanjang hayat dan hakikat profesi kedokteran gigi [13].

Penyusunan kurikulum kedokteran gigi haruslah berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI), dimana SKDGI disusun melalui pengorganisasian kompetensi berdasarkan pendekatan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus/spesifik yaitu domain, kompetensi utama, kompetensi penunjang dan kemampuan dasar. Domain adalah kategori kepentingan atau kebutuhan bagi dokter gigi dalam menjalankan aktivitas profesional dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Fungsinya untuk membimbing penyusunan kurikulum ke arah pembelajaran terpadu agar terhindar dari penyusunan kurikulum yang mencerminkan *departemental/context/ discipline based*. Domain untuk kompetensi dokter gigi meliputi [14] :

Domain I: Profesionalisme, yaitu melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan.

Domain II: Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, maksudnya ialah memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

Domain III: Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik, adalah melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Domain IV: Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik, yaitu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

Domain V: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat, adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima.

Domain VI: Manajemen Praktik Kedokteran Gigi, yang berarti menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik KG

Penyusunan kurikulum kedokteran gigi selain dari SKDGI juga berdasarkan SNPK (Standar Nasional Pendidikan Kedokteran), SNP2DG (Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Gigi).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah survei deskriptif dengan menggunakan *online form* melalui web dikti. Populasi adalah seluruh dosen dan mahasiswa. Sampel yang digunakan adalah dosen tetap FKG UMS dan mahasiswa S1 FKG UMS. Jumlah responden adalah 17 dosen tetap FKG UMS dan 346 mahasiswa S1 FKG UMS.

4. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan kedokteran gigi hakikatnya merupakan pendidikan profesional yang mencakup pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada bidang kedokteran gigi, keterampilan klinik serta sikap untuk dapat menjadi dokter gigi yang profesional [14]. Lulusan dokter gigi harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi yang terdiri dari domain, kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Pencapaian standar kompetensi lulusan tersebut harus diimbangi dengan kurikulum yang memiliki batasan, kedalaman serta saling terkait antara modul yang satu dengan modul yang lainnya. Pembelajaran juga harus bersifat mulai dari dasar, menengah

hingga ke tinggi serta keterampilan yang spesifik. Kurikulum ini tetap harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan pada waktu ke waktu. Kurikulum dalam kedokteran gigi juga menggunakan metode pembelajaran aktif yang berorientasi pada mahasiswa [15].

Metode pembelajaran aktif yang berorientasi pada mahasiswa, menuntut mahasiswa untuk mengikuti semua jenis perkuliahan secara penuh. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) kedokteran gigi bukan hanya mengetahui tetapi harus mampu melakukan [15], termasuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta disusun berdasarkan SNPK, SNP2DG dan SKDGI.

Pencapaian kompetensi mampu melakukan atau memiliki *skill* dalam melakukan tindakan kedokteran gigi tersebut akan sangat sulit dipenuhi apabila mahasiswa harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama tiga semester, seperti program MBKM. Sebagai prodi bidang kesehatan, FKG sebenarnya sudah dari lama memiliki program magang di luar kampus. Hanya saja jumlah konversi SKS-nya berbeda dan dulu belum mengenal istilah MBKM. Beberapa program FKG terkait MBKM dengan melibatkan rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, serta penelitian PKM sebagai wahana pendidikan yang bisa dikonversikan ke dalam kegiatan Mata Kuliah *Life Skills*. Hal tersebut sesuai dengan hasil survei dosen FKG UMS tentang jumlah SKS yang dapat diakui atau disetarakan. Sebanyak 55% dosen FKG UMS menjawab jumlah SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM adalah kurang dari 10 SKS.

Penerapan dan penyelenggaraan kurikulum MBKM yang sesuai dengan kebijakan Kemendikbud pada Fakultas Kedokteran Gigi akan menimbulkan resiko berkurangnya fokus mahasiswa terhadap pembelajaran teoritikal dan praktikal ilmu kesehatan khususnya kedokteran gigi. Hal tersebut sesuai dengan hasil survei dosen FKG UMS, dimana sebanyak 21% kurang menyarankan dan 32% tidak menyarankan mahasiswa FKG UMS untuk mengambil kegiatan MBKM. Kurang memberikan dorongan untuk mahasiswa FKG UMS untuk mengikuti program MBKM bukan berarti dosen FKG UMS tidak bersedia membimbing. Sebagian besar tetap bersedia untuk membimbing yaitu 33% selalu bersedia dan 55% sesekali bersedia untuk membimbing.

Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam merdeka belajar belum mendapatkan kesiapan dari mahasiswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebanyak 53% mahasiswa belum menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM, dan 3% yang menyatakan tidak berminat. MBKM mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Mahasiswa dengan persentase yaitu 51% mengaku kurang mengetahui tentang Kebijakan MBKM.

Pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012. Mulai dari kepribadian, *soft skill*, ketrampilan, hingga bela Negara. Diharapkan keseluruhan mahasiswa dengan target 100% dapat meningkatkan *soft skill* setelah mengikuti MBKM dalam mengembangkan kompetensi sebagai bekal bekerja setelah lulus. Sebanyak 1% mahasiswa masih meyakini bahwa kegiatan MBKM kurang bermanfaat.

Berdasarkan beberapa artikel jurnal terkait dengan kurikulum pendidikan kedokteran gigi yang diharapkan dapat membantu lulusan memperoleh pekerjaan dan menjalankan tugas sesuai kemampuannya secara kompeten dan percaya diri antara lain:

1. Semakin banyak mahasiswa mendapatkan pelatihan terkait kompetensi psikomotor lulusan dokter gigi maka akan semakin merasa mampu dan percaya diri dalam menjalankan pekerjaannya
2. Pengalaman kuliah lapangan/ kerja lapangan memberikan gambaran peran dokter gigi di masyarakat

3. Nilai akademik akan mempengaruhi kemungkinan mendapat pekerjaan
4. Kemampuan mahasiswa mengadaptasi teknologi informasi dalam bidang kedokteran gigi akan memudahkan lulusan beradaptasi dengan lingkungan kerja
5. Pendidikan yang menekankan penguasaan keilmuan saja kurang memberikan bekal kesiapan untuk menghadapi kasus yang kompleks berkaitan dengan perawatan pada pasien
6. Pendidikan dengan pendekatan multidisiplin seperti sosial budaya, komunikasi, studi banding dapat memperkaya pengalaman sosial yang membantu dalam memahami masyarakat sebagai pasien

Keterkaitan penerapan MBKM dalam pendidikan dokter gigi tidak sepenuhnya dapat diterapkan namun juga tidak mustahil diterapkan. Terdapat aspek-aspek tertentu sebagaimana disebutkan dalam poin 2, 4, dan 6 yang dapat membantu lulusan mencapai kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Meski demikian seorang lulusan dokter gigi wajib menguasai keilmuan dan ketrampilan khusus yang berkaitan dengan bidang kedokteran gigi yang hanya dapat diperoleh dengan kuantitas dan kualitas pelatihan. Aspek itu hanya dapat diperoleh ketika mahasiswa berada dan dididik dalam bidang yang sesuai yaitu Program Studi Pendidikan Dokter Gigi itu sendiri bukan program studi lain yang sifatnya hanya sebagai penunjang. Oleh karena itu 40 SKS atau 3 semester bagi mahasiswa kedokteran gigi untuk belajar di program studi lain akan terlalu banyak dan khawatir justru akan mengurangi porsi mereka untuk belajar dalam bidang keilmuannya.

Penulis berpendapat bahwa MBKM dapat diterapkan di program studi Pendidikan dokter gigi dengan kriteria tertentu yakni sebagai mata kuliah pilihan yang besaran SKS nya tidak lebih dari 10 SKS.

5. Kesimpulan

Hasil survei dosen FKG UMS tentang kebijakan MBKM masih banyak yang kurang memahami. Sebagian besar dosen kurang mendukung kebijakan MBKM diterapkan pada mahasiswa FKG UMS. Pelaksanaan program yang menyerupai MBKM di FKG UMS hanya dikonversikan kurang dari 10 SKS. MBKM apabila diterapkan sesuai dengan aturan kemendikbud pada mahasiswa FKG UMS dapat menghambat atau mengurangi waktu belajar baik teoritikal dan praktikal, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan untuk mahasiswa kedokteran gigi pada penerapan MBKM sehingga tidak mengurangi waktu pembelajaran yang terlalu banyak dan tanpa mempengaruhi capaian pembelajaran lulusan mahasiswa di prodi Kedokteran Gigi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

Referensi

- [1] Elayyan, S. (2021). Education According to the Fourth Industrial Industrial Revolution. *Journal of Educational Technology and Online Learning*. <https://doi.org/10.31681/jetol.737193>

- [2] Lase, D. (2019). Education And Industrial Revolution 4.0 Delipiter. *Jurnal Handayani (JH)*, 10(1), 48–62. <https://doi.org/10.24114/jh.v10i1>
- [3] Wulandari, D., Arifin, S., Cahyono, E., Kusumawardani, S. S., Hertono, G. F., & Wastutiningsih, S. P. (2021). *Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Centre of Excellence Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. 17.
- [4] Ashari, M. (2021). Prodi Kesehatan Dikecualikan dari Program Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem Makarim. In www.pikiran-rakyat.com.
- [5] Ciba, B., & Rahmat, A. (2019). *Reformasi Perguruan Tinggi Indonesia : Sebuah Otonomi Semu yang Dijanjikan* (Issue February).
- [6] Spoetl, G., & Tütlys, V. (2020). Education and Training for the Fourth Industrial Revolution. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 26(1), 83–93. <https://doi.org/10.21831/jptk.v26i1.29848>
- [7] Grinshkun, V., & Osipovskaya, E. (2020). Teaching in the fourth industrial revolution: Transition to education 4.0. *CEUR Workshop Proceedings*, 2770(19), 9–15.
- [8] Harahap, M. (2018). Revolusi industri 4.0 dan pengaruhnya terhadap peran pendidik di abad 21 dalam dunia pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2, 578–580.
- [9] Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- [10] Heriyanto, Sator, D., Komariah, A., & Suryana, A. (2019). Character education in the era of industrial revolution 4.0 and its relevance to the high school learning transformation process. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 24(Extra5), 327–340.
- [11] Krumsvik, R. J., Jones, L. Ø., & Klock, K. S. (2020). Student Response System in Dental Students' Education. Using a Student Response System and Peer Discussion to Raise the Awareness of the Importance of Good Professional
- [12] Fadel, H. T., Baghlaf, K., Gassem, A. Ben, Bakeer, H., Alsharif, A. T., & Kassim, S. (2020). Dental students' perceptions before and after attending a centre for children with special needs: A qualitative study on situated learning. *Dentistry Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/DJ8030069>
- [13] Fita, S., Alshuraim, F., Almulhim, A., Alhumaid, J., Alhareky, M., & Nazir, M. (2020). Possible Future Career Challenges and Associated Factors among Dental Students and Interns. *International Journal of Dentistry*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/9730125>
- [14] Konsil Kedokteran Indonesia, K. (2012). *Standar pendidikan profesi dokter gigi indonesia*.
- [15] Konsil Kedokteran Indonesia, K. (2006). *Standar kompetensi dokter gigi* (1st ed.). Konsil Kedokteran Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)